



Reviu

Capaian SPBE 2023

“Digitalisasi tata kelola Pemerintahan”

**Pemerintah Provinsi
Sulawesi Barat**

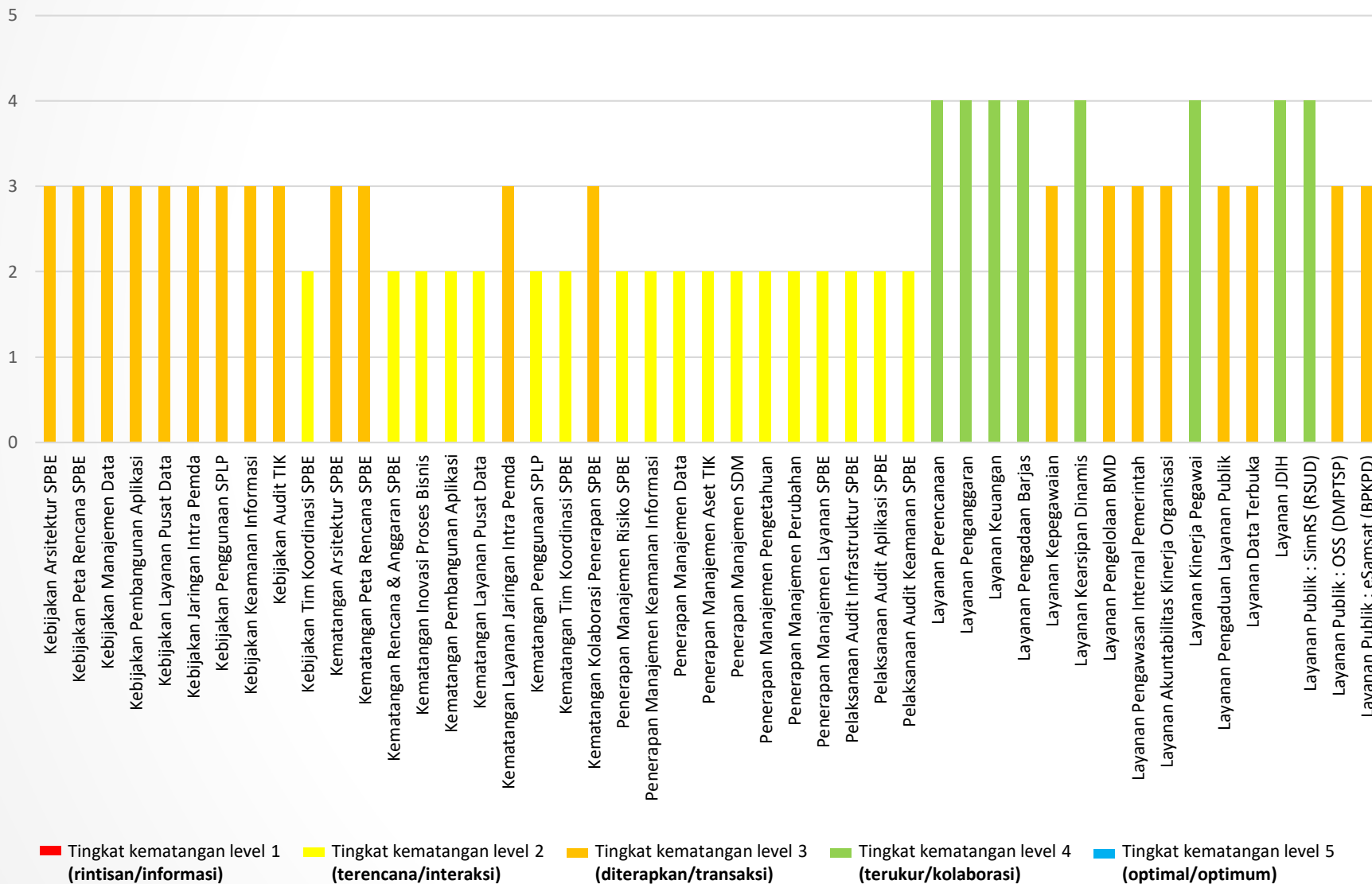


SPBE Pemprov Sulbar 2023

KepmenPAN Nomor 13 Tahun 2024



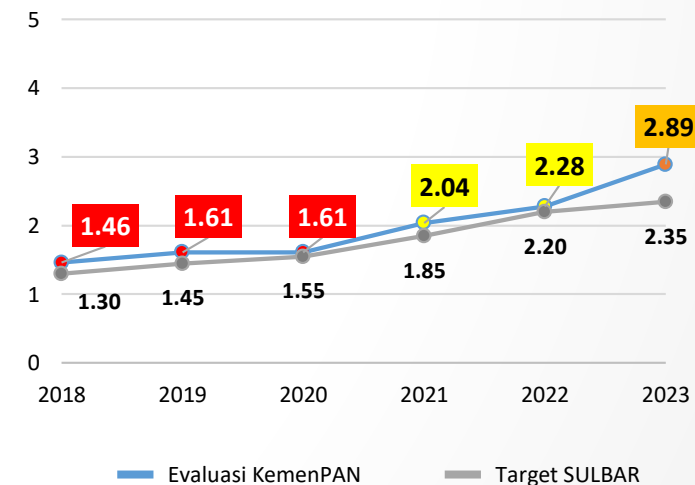
Capaian SPBE 47 Indikator



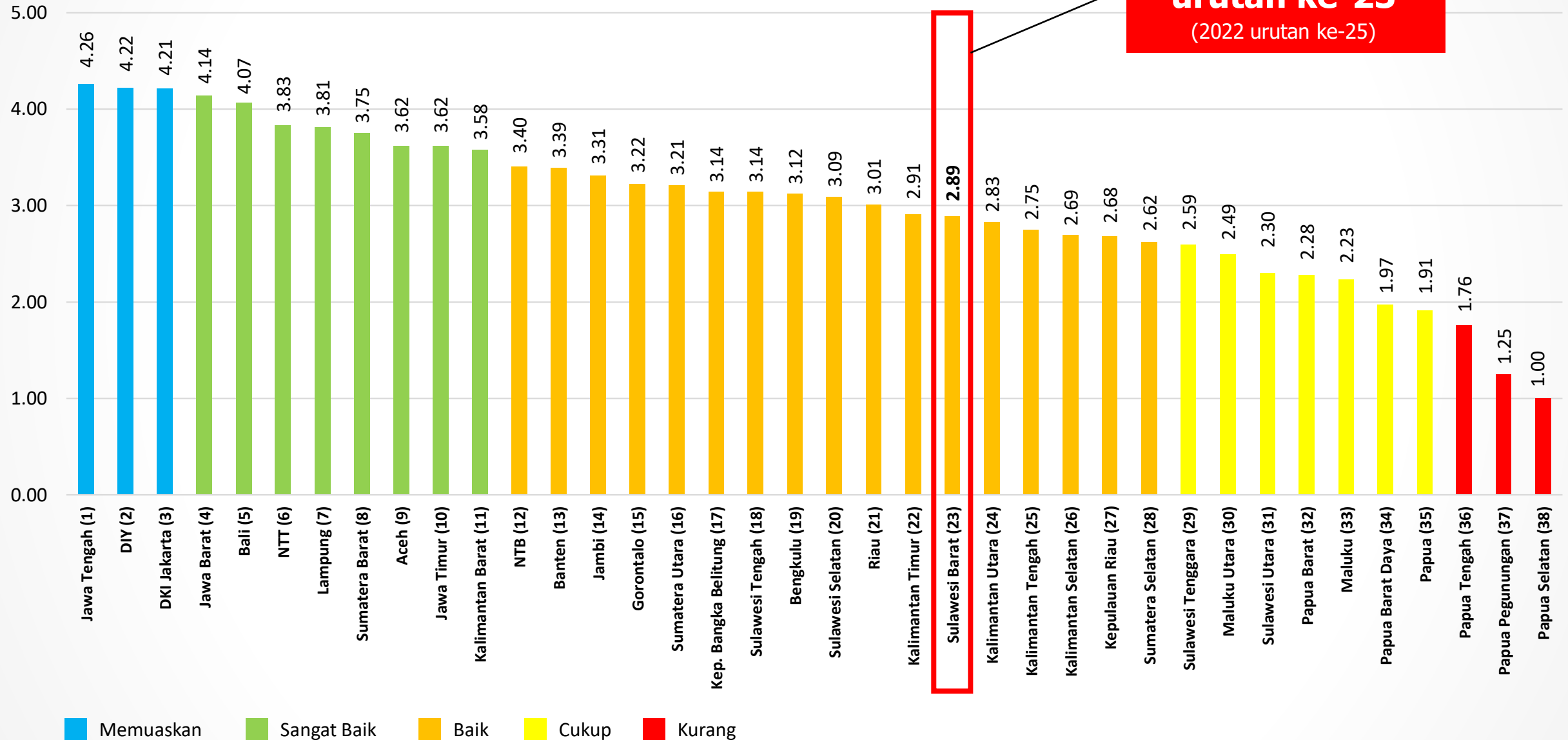
INDEKS : 2,89 (BAIK)

domain kebijakan : 2.90
 domain tata kelola : 2.40
 domain manajemen : 2.00
 domain layanan : 3.49

Peningkatan Indeks SPBE Sulbar



Urutan indeks SPBE Provinsi 2023



SULBAR
urutan ke-23
(2022 urutan ke-25)

Kelemahan SPBE Pemprov Sulbar



1

Perlu dilaksanakan reviu kebijakan, tatakelola, manajemen dan layanan (capaian level 4 untuk semua indikator)

5

Menunjukkan penambahan fitur, peningkatan keamanan, perbaikan error, dsb pada aplikasi yang dikembangkan

9

Manajemen risiko, keamanan informasi, data, aset TIK, SDM, pengetahuan, perubahan dan layanan belum dilaksanakan sesuai Permenpan, serta belum dilakukan pengendalian terhadap OPD yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE

2

Mesti dilakukan tindak lanjut hasil reviu kebijakan, tatakelola, manajemen dan layanan (capaian level 5 untuk semua indikator)

6

Belum ada dokumen pemanfaatan layanan pusat data dan interkoneksi dengan Pusat Data Nasional

10

Belum melaksanakan audit infrastruktur, aplikasi dan keamanan SPBE

3

Perlu Kebijakan internal yang mengatur perencanaan dan penganggaran SPBE dikonsultasikan melalui unit pengelola TIK

7

Jaringan intra pemprov belum terkoneksi ke seluruh pemkab

11

Beberapa urusan pemerintahan diselenggarakan belum menggunakan sistem elektronik dan belum dilakukan integrasi sistem antar aplikasi layanan

4

Belum ada dokumen hasil perubahan proses bisnis yang lengkap

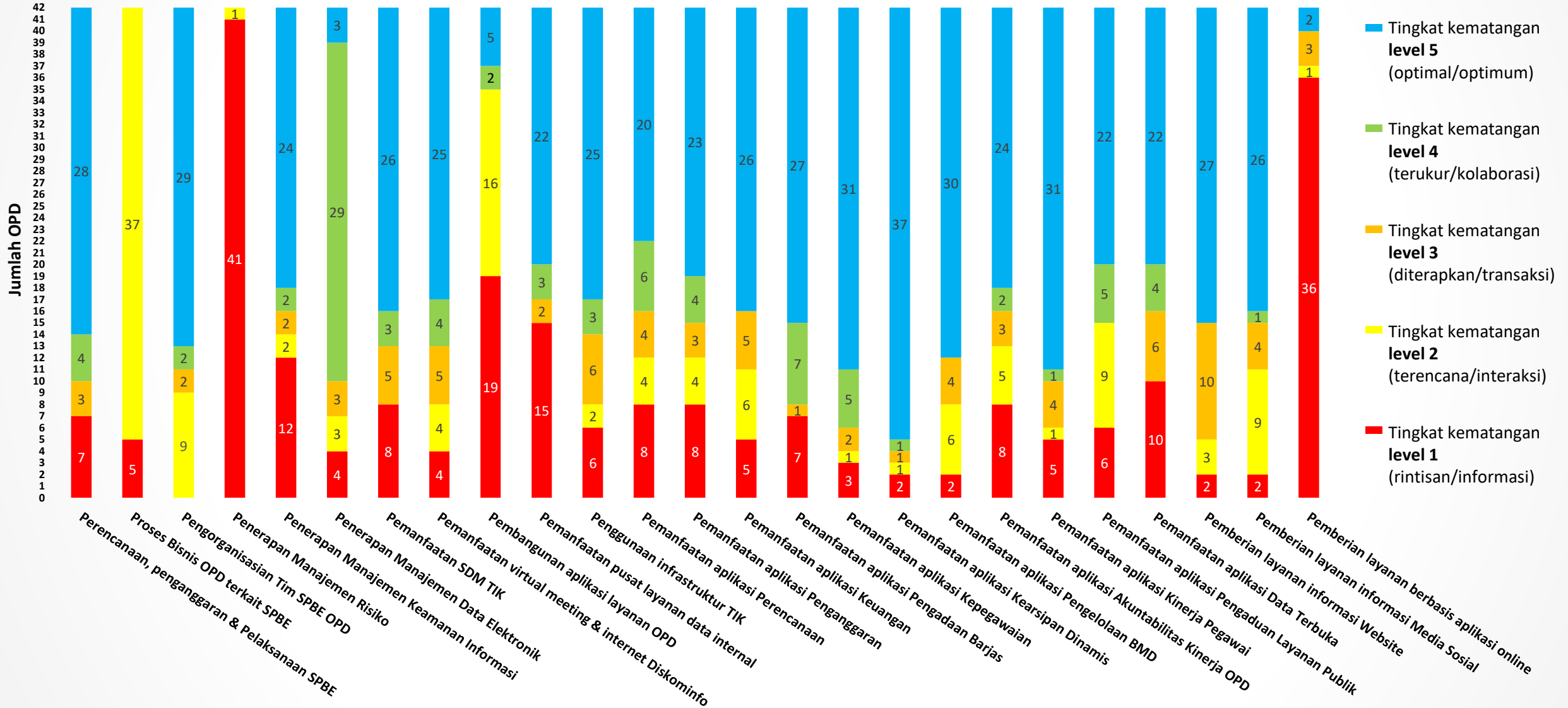
8

Belum ada evaluasi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SPBE

12

Kekurangan SDM Programmer, butuh dukungan anggaran khusus 2 Milyar/tahun untuk *outsourcing* tenaga tambahan *in house* pengembang sistem informasi

Capaian SPBE OPD 25 Indikator



Indeks SPBE OPD 2023

SK Gubernur Sulbar Nomor 780 Tahun 2023



MEMUASKAN (4,2 – < 4,2)

1	BPKPD	4.54
2	Diskominfo	4.46
3	DPM-PTSP	4.46
4	RSUD	4.46
5	BKD	4.34
6	Biro Hukum	4.28
7	Biro Umum	4.22
8	BAPPEDA	4.20
9	Biro Ortala	4.20
10	Biro Barjas	4.20
11	DKP	4.20
12	Dinas Kesehatan	4.20
13	Dinas Perpustakaan & Arsip	4.20
14	Inspektorat	4.20
15	Satpol PP & Damkar	4.20

SANGAT BAIK (3,5 – < 4,2)

1	Dinas Perhubungan	4.16
2	Dinas Kehutanan	4.14
3	Dinas Pariwisata	4.12
4	DLH	4.10
5	Biro Ekbang	3.98
6	Dinas Perkebunan	3.80
7	Dinas Ketapang	3.68
8	Dispora	3.62

BAIK (2,6 – < 3,5)

1	BPSDM	3.44
2	Dinas DIKBUD	3.42
3	Dinsos	3.26
4	DTPHP	3.20
5	Disdukcapil	3.16
6	Dinas PUPR	2.86
7	Balitbang	2.72
8	Badan Kesbangpol	2.68

CUKUP (1,8 – < 2,6)

1	Disnaker	2.48
2	Disperinkop & UKM	2.46
3	Dinas ESDM	2.34
4	Sekretariat DPRD	2.34
5	Disperumkin	2.22
6	Badan Penghubung	2.16
7	Dinas P3APP & KB	2.06
8	Biro Pemkesra	1.92
9	BPBD	1.88
10	Dinas Transmigrasi	1.82
11	DPMD	1.80

*Indeks diperoleh dari hasil evaluasi SPBE OPD 25 indikator pada 3 domain (Manajemen, Layanan & Tata kelola) berdasarkan SK Gub No. 188.4/478/SULBAR/XII/2022

Arahan perbaikan SPBE OPD



Arsitektur SPBE OPD

Sempurnakan dan mutakhirkan:

1. Daftar layanan berbasis urusan pemerintahan
2. Proses bisnis organisasi & layanan
3. Data elektronik yang dibutuhkan dan dihasilkan
4. Aplikasi/Sistem Informasi sesuai tugas dan fungsi

- Target 1 urusan pemerintahan 1 aplikasi
- Aplikasi bisa banyak fitur sesuai jumlah layanan dan proses bisnis
- Aplikasi dapat menggunakan dari kementerian, pemda lain berbagi pakai atau membangun baru melalui Dinas Kominfo



Perangkat Jaringan TIK

Lengkapi sesuai rekomendasi teknis:

1. Access Point min 4 unit
2. Router 1 unit
3. Kabel UTP 1 roll
4. TV Monitor min 65" 1 unit
5. Camera Video Confrence 1 unit

4 OPD dengan peralatan yang BELUM sesuai standar :

- Dinas Dukcapil
- Dinas Perindagkop & UKM
- BPBD
- ESDM



Pengorganisasian Tim Kerja SPBE OPD

1. Ketua Tim (Kepala OPD)
2. Pelaksana manajerial
3. Koordinator teknis
4. Admin web dan medsos
5. Admin tata kelola aplikasi
6. Admin jaringan dan multimedia
7. Desain grafis
8. Penyaji informasi dan konten

- Perlu kepedulian Kepala OPD konsisten meluangkan waktu memperhatikan dan mengawal pelaksanaan SPBE di instansinya
- Agar bekerja aktif, kompak dan terencana
- Lakukan koordinasi dan pemantauan internal berkala
- Berikan dukungan fasilitas kerja tim berupa peralatan, insentif dan logistik meeting



Pembiayaan SPBE OPD

1. Pengadaan dan perawatan peralatan jaringan TIK
2. Pemberian Insentif bulanan Tim Kerja SPBE
3. Fasilitasi rapat-rapat SPBE
4. Dukung pembiayaan pengembangan SDM TIK

- Pastikan anggarannya tersedia 2024
- Gunakan dana tepat sasaran (insentif dan barang)
- Prioritaskan pada kebutuhan yang paling mendesak
- 3 OPD yang TIDAK menganggarkan SPBE 2024 :
 1. Biro Ortala
 2. Dinas ESDM
 3. DP3AP2 & KB



Layanan Informasi Digital online

1. Website resmi
2. Media sosial (Facebook, Instagram & Youtube)
3. Aplikasi /sistem informasi layanan dan kinerja sesuai tugas dan fungsi








- Lengkapi dan update berita, informasi dan data di website dan semua platform media sosial
- Buat informasi (infografis) dan tampilan yang menarik
- Optimalkan layanan interaktif (jajak pendapat/respon komentar publik di kolom chat)

Surat Edaran Mendagri

Nomor : 000.9.3.2/92/SJ Tanggal 5 Januari 2024



Peran Pemerintah Daerah dalam Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional

-  Melaksanakan keterpaduan layanan digital pemda melalui SPBE yang efisien dan efektif
-  Menyederhanakan proses bisnis, layanan pemerintahan dan layanan publik yang berfokus pada kebutuhan pengguna
-  Mengkonsolidasi seluruh aplikasi SPBE Pemda ke dalam 1 portal layanan sebagai transisi menuju portal layanan nasional yang selaras dengan arsitektur SPBE
-  Optimalisasi rencana dan anggaran SPBE yang terpadu berdasarkan arsitektur SPBE Pemda yang sesuai dengan ketentuan peraturan perencanaan pembangunan dan penyusunan APBD
-  Menugaskan kepada BAPPERIDA untuk melakukan reviu keterpaduan rencana dan anggaran SPBE Provinsi
-  Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah melakukan pemantauan dan pengawasan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Kabupaten
-  Gubernur melaporkan pelaksanaan Surat Edaran SPBE ini kepada Mendagri setiap 6 bulan



“ SPBE itu bukan hanya digitalisasi penggunaan teknologi semata, tapi yang utama adalah perbaikan kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan organisasi berbasis kewenangan urusan, tugas dan fungsi dalam membentuk ekosistem kerja yang efisien terintegrasi ”

SPBE Sulbar Maju Terus

Bidang Layanan e-Government

*Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian & Statistik
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat*

Jl. Abd. Malik Pattana Endeng
Rangas, Mamuju